

## Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba

Dika Dona Syahputra<sup>1\*</sup>, Melly Br Bangun<sup>2</sup>, Silvia Mariah Handayani<sup>3</sup>

### Abstrak

Akses pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, terdapat ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan. Budaya patriarki, norma budaya lokal, dan adat istiadat menjadi faktor utama yang memengaruhi disparitas ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan yang terjadi di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling/ Probability Sampling*. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah 15 orang perempuan di Desa Bontoraja. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 40% responden setuju dan tidak setuju terhadap kesetaraan akses pendidikan, sementara 20% bersikap netral. Dalam hal peran gender dalam keluarga, 33,3% responden sangat setuju bahwa orang tua mendukung pendidikan anak perempuan, namun 26,7% menyatakan ketidaksetujuan. Terdapat perbedaan pandangan yang signifikan 40% terkait dampak negatif norma budaya dan tradisi lokal yang membatasi akses pendidikan anak perempuan. Hasil ini mengindikasikan adanya pola budaya patriarki yang masih kuat, tercermin dalam akses terhadap pendidikan dan peran gender dalam keluarga. Terdapat variasi pandangan masyarakat mengenai pendidikan anak perempuan, dan norma budaya serta adat istiadat setempat memainkan peran penting dalam membentuk akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan.

**Kata kunci:** Pendidikan; Perempuan; Kesetaraan Gender; Budaya Patriarki

#### History:

Received : 09 Dec 2023

Revised : 11 Dec 2023

Accepted : 13 Nov 2023

Published : 16 Dec 2023

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Medan

\*Author Correspondent: [dikadonasyahputra7011@gmail.com](mailto:dikadonasyahputra7011@gmail.com)

**Publishers:** LPM IAIN Shaykh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

**Licensed:** This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### Pendahuluan

Seluruh negara didunia, tidak dipungkiri bila setiap warga negaranya membutuhkan Pendidikan dalam kehidupannya, karena tanpa disadari ada atau tidaknya Pendidikan dapat menjadi tolak ukur seberapa besar negara mensejahterakan rakyatnya. Pendidikan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (Adriani, 2019). Indonesia sudah memberikan kebebasan setiap warga negara untuk mengenyam Pendidikan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Namun faktanya masih terdapat permasalahan dalam pembangunan tersebut. Salah satu permasalahan tersebut yaitu patriarki dan kesetaraan gender dalam lingkup Pendidikan. Keadilan dan kesetaraan gender adalah salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini (Saeful, 2019).

Budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. paradigma patriarki yang seringkali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebak bahwa perempuan meskipun menempuh pendidikan yang tinggi, posisi yang paling baik dan amat ideal adalah sebagai kepala dapur keluarga

(Sulistiyowati, 2021). Laki-laki dianggap lebih kuat, potensial, dan produktif, sehingga mereka berperan penting dalam masyarakat. Sebaliknya, perempuan dianggap memiliki ruang gerak terbatas karena organ reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, dan menyusui (Aprizal & Lelah, 2021). Pandangan ini telah menjadi bagian integral dari budaya, di mana masyarakat tetap meyakini dominasi tunggal oleh laki-laki dalam berbagai bidang, yang pada gilirannya menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan peluang bagi perempuan untuk berkembang dalam bidang tersebut (Aprilia, et al, 2023). Diskriminasi berbasis gender ini dapat menjadi factor perempuan mendapatkan perlakuan bersifat eksploitasi. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diyakini akan mengakhiri kemiskinan perempuan. Salah satu penyebab kemiskinan perempuan adalah adanya budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya perempuan tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Faktanya, terdapat perempuan yang mampu membantu laki-laki dalam bekerja dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga.

Menurut Rokhmansyah (2016). pada bukunya "Pengantar Gender dan Feminisme", konsep patriarki merujuk pada struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang mengendalikan hampir semua aspek kehidupan. Sistem patriarki ini mengakar dalam budaya masyarakat dan menyebabkan ketimpangan serta ketidakadilan gender yang berdampak luas. Laki-laki mendominasi peran kontrol dalam masyarakat sementara perempuan seringkali tidak memiliki pengaruh signifikan atau bahkan kebebasan dalam berbagai ranah kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga psikologis, termasuk di dalamnya lembaga pernikahan. Pembatasan kebebasan perempuan mengakibatkan mereka terjebak dan tidak memperoleh hak akses yang setara dengan laki-laki (Sakina & A., 2017).

Keterbatasan peran perempuan yang ditetapkan oleh budaya patriarki mengakibatkan perempuan terjebak dalam posisi subordinat atau dianggap rendah. Akibatnya, terjadi ketidakadilan gender di tengah masyarakat yang menerapkan sistem patriarki, di mana perempuan cenderung menjadi pihak yang mengalami kerugian (Ari & Janottama, 2021). Ketimpangan ini menjadi penghalang struktural yang menghambat akses kesetaraan bagi individu di masyarakat. Kurangnya responsibilitas pemerintah terhadap kebutuhan perempuan juga menyebabkan mereka sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak sensitif. Ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada perempuan juga memperkuat marginalisasi mereka.

Aspek historis dan budaya menegaskan peran perempuan sebagai pihak yang terpinggirkan melalui dinamika kekuasaan patriarkal, baik dalam skala personal maupun lewat kebijakan negara. Pada zaman penjajahan di Indonesia, baik oleh Belanda maupun Jepang, perempuan sering dimanfaatkan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang berdinasi di negara ini. Pada masa itu, ada larangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, kecuali bila mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan perempuan (Convention Watch, 2007). Ketimpangan akses pendidikan perempuan di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki yang melekat pada masyarakat (Nasir & Lilianti, 2017).

Masyarakat yang menganut sistem patriarki cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan (Rokhmansyah, 2016). Dengan menetapkan hak-hak yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan, masyarakat patriarkal menetapkan standar untuk posisi perempuan yang tidak setara dalam keluarga dan masyarakat (Zuhri & Amalia, 2022). Ketimpangan yang diciptakan dari adanya budaya patriarki membias hingga beberapa aspek kehidupan masyarakat yang meliputi Kesehatan, politik hingga Pendidikan. Budaya paternalistik dan ideologi patriarki yang dianut oleh masyarakat membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini berdampak negatif terhadap kualitas hidup perempuan, seperti yang terjadi di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, perempuan

dianggap tidak memerlukan Pendidikan dikarenakan stereotipe bahwa tugas perempuan nantinya hanya didapur, mencuci, menyiapkan makanan hal tersebut yang menyebabkan bahwa hanya laki-laki yang berperan penting dalam memperoleh akses Pendidikan dengan baik. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bahwa hanya laki-laki yang dapat mencari nafkah maka dari itu perempuan tidak diutamakan dalam megenyam Pendidikan. Sistem seperti ini masih sering terjadi di Masyarakat khususnya di Desa Bontoraja, dimana sistem kekerabatan yang dianut bersifat patrilineal, yang mengutamakan garis keturunan pihak laki-laki (Moechtar, 2019).

Sistem ini secara langsung mendorong pertumbuhan budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan, sehingga mengutamakan pendidikan cenderung diberikan kepada anak laki-laki. Data menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 adalah 8,23% untuk laki-laki dan 7,93% untuk perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2022). Meskipun terdapat berbagai gerakan feminis dan upaya aktif dari aktivis perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, praktik budaya patriarki masih terus berlanjut di Indonesia.

Praktik ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas domestik, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan dalam ranah pendidikan. Dampak dari praktik-praktik ini melahirkan sejumlah masalah sosial di Indonesia, khususnya di Desa Bontoraja terkait dengan bidang pendidikan yang masih sangat mendominasi laki-laki sebagai gender yang paling diutamakan pendidikannya. Jika dilihat dari sudut pandang penyelesaian masalah, dampak dari budaya patriarki di Indonesia cenderung diinterpretasikan melalui pendekatan "blame approach", yang berarti masalah tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian sistem dengan harapan atau keinginan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama artikel ini adalah untuk melihat Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk membuat gambaran atau sebuah deskripsi secara sistematis, faktual, dan berdasarkan fenomena yang terjadi. Kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka sebagai hasil penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling/ Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah 15 orang perempuan di Desa Bontoraja. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup dikelola dalam sebuah formulir online menggunakan Google Form, kemudian data diolah dan dianalisis secara statistik deskriptif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data. Data berupa jawaban dari hasil yang dikumpulkan lewat kuesioner tertutup yang telah disusun dengan teratur.

## **Hasil dan Diskusi**

Akses pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga. Dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional pemerintah telah memberikan wajib belajar selama 6 tahun dan saat ini mulai merancang wajib belajar 12 tahun. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yaitu pada patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan. Untuk memahami kesetaraan gender, pendidikan sangat penting (Hazairin et al., 2023). Tercatat IPM laki-laki mencapai 75,43% sedangkan perempuan 68,63%

(Badan Pusat Statistik, 2018). Maka dari itu secara konseptual, realitas ini dapat disimpulkan bahwa adanya disparitas pada gender. Ketidaksetaraan pada akses perempuan dalam pendidikan salah satu penyebabnya yaitu budaya patriaki (Nasir & Lilianti, 2017).

Persepsi pada patriaki ialah laki-laki memiliki wewenang yang lebih dalam segala hal dibandingkan dengan perempuan (Rokhmansyah, 2016). Budaya ini dapat membatasi perempuan dalam meningkatkan diri di dalam pendidikan. Pada masyarakat masih terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya akan kebalik ke rumah dan mengurus dapur. Bahkan pada keluarga yang memiliki keuangan terbatas, maka pendidikan lebih diprioritaskan pada anak laki-laki dari pada perempuan (Narwoko et al., 2013).

Pemerataan pendidikan memberikan makna bahwa seluruh warga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pemerataan dapat di bagi menjadi dua yaitu, persamaan kesempatan dan aspek keadilan. Pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu investasi pada pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul. Namun kenyataannya yang masih terjadi di masyarakat yaitu, masih terdapat pengaruh kultur sehingga sebagian warga terpinggirkan dalam mengakses pendidikan. Negara menjamin terkait adanya persamaan pada akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Kaum perempuan juga memiliki akses setara dengan laki-laki dalam perannya di masyarakat (Mukhtar, 2019). Namun karena terdapat permasalahan diskriminasi gender menyebabkan beberapa kesenjangan dalam aspek pendidikan bagi perempuan. Efek diskriminasi gender tidak lepas dikarenakan masih bertahannya budaya patriaki yang berkembang (Sakina, 2017). Pada kesempatan ini penulis akan mendeskripsikan kondisi pendidikan di Desa Bontoraja terkait patriaki dan ketidaksetaraan gender yang terdapat di desa tersebut.

Bontoraja adalah salah satu desa di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Warga desa Bontoraja merupakan sasaran sebagai responden dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 Indikator dalam penelitian ini yaitu, 1. Perbedaan akses pendidikan dan 2. Peran gender dalam keluarga. Kedua indikator tersebut digunakan untuk menyusun butir item pada setiap pernyataan yang diberikan. Setelah tersusun berwujud kuesioner tertutup dalam google formulir, maka hasil dapat diuraikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian terkait budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam lingkup pendidikan di Desa Bontoraja, Kab. Bulukumba. Berdasarkan uji data melalui google formulir, hasil yang dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 1.  
Perbedaan Akses Pendidikan

Item	Hasil Dalam Persentase				
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
1. Siswa perempuan dan laki-laki di Desa Bontoraja memiliki akses yang sama untuk mendapat pendidikan.	40%	0%	20%	40%	0%
2. Fasilitas pendidikan di Desa Bontoraja tersedia secara merata untuk siswa perempuan dan laki-laki.	33,3%	13,3%	13,3%	33,3%	6,7%
3. Materi pelajaran di sekolah tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.	33,3%	20%	20%	20%	6,7%
4. Guru di Desa Bontoraja memperlakukan semua siswa	33,3%	0%	33,3%	20%	13%

Item	Hasil Dalam Persentase				
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
5. Perempuan di Desa Bontoraja dengan adil tanpa memandang perbedaan gender. memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan di ranah pendidikan.	33,3%	6,7%	13,3%	33,3%	13,3%

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, masih terdapat perbedaan persepsi antara akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang relatif sama, meskipun terdapat perbedaan pendapat, sebagian besar responden 40% menyatakan bahwa siswa perempuan dan laki-laki di Desa Bontoraja memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Namun, 40% lainnya menyatakan tidak setuju, menunjukkan adanya perbedaan persepsi di masyarakat. Perlu diketahui dalam deklarasi hak asasi manusia (HAM) pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk sekolah tingkat dasar dan menengah” (Fatimah, 2014). Hasil dari penelitian tersebut kesenjangan dalam akses pendidikan masih terdapat di Desa Bontoraja.

Pada hasil survei pernyataan fasilitas yang diberikan menunjukkan bahwa Fasilitas pendidikan belum tersebar merata, responden menilai bahwa fasilitas pendidikan di Desa Bontoraja belum sepenuhnya tersedia secara merata untuk siswa perempuan dan laki-laki. Hanya 33,3% yang setuju bahwa fasilitas tersebut tersebar merata, sementara 33,3% lainnya tidak setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan dalam penyediaan fasilitas pendidikan di Desa Bontoraja dan terdapat diskriminatif pada pemberian materi untuk siswa perempuan, terdapat 20% responden yang menyatakan ketidaksetujuan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait kesetaraan dalam materi pembelajaran. Perempuan yang dapat mengenyam pendidikan dengan baik merupakan sebuah investasi bagi diri sendiri dan juga untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Terdapat 33,3% responden yang sangat setuju bahwa guru di Desa Bontoraja memperlakukan semua siswa dengan adil tanpa memandang perbedaan gender, namun, 20% menyatakan ketidaksetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi gender dalam perlakuan guru terhadap siswa di Desa Bontoraja. Survei juga menunjukkan bahwa Kesempatan perempuan untuk mendapatkan penghargaan belum optimal di ranah pendidikan. Hanya 33,3% yang setuju, sementara 33,3% menyatakan ketidaksetujuan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat tidak optimalnya pemberian penghargaan terhadap prestasi siswa perempuan di Desa Bontoraja.

Berdasarkan hasil survei di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun sebagian responden setuju bahwa siswa perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, persentase yang signifikan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap hal tersebut. Sementara itu, kurangnya konsensus juga terlihat dalam persepsi terhadap ketidakmerataan fasilitas pendidikan, materi pelajaran, dan perlakuan guru terhadap siswa berdasarkan gender.

Fakta bahwa hanya sepertiga responden yang sepakat bahwa perempuan di Desa Bontoraja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pengakuan terhadap prestasi siswa perempuan. Kesimpulan survei ini menunjukan adanya tantangan serius terkait perbedaan gender dalam pendidikan di Desa Bontoraja yang memerlukan perhatian dan upaya bersama untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik.

Tabel 2.  
Pola Peran Gender Dalam Keluarga

Item	Hasil Dalam Persentase				
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
1. Orang tua di Desa Bontoraja mendukung pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk anak perempuan.	33,3%	0%	26,7%	33,3%	6,7%
2. Peran anak perempuan dalam keluarga memengaruhi kesempatan mereka dalam pendidikan.	33,3%	20%	13,3%	26,7%	6,7%
3. Remaja di Desa Bontoraja dinilai secara adil tanpa memandang perbedaan gender.	26,7%	13,3%	13,3%	20%	26,7%
4. Norma-norma budaya lokal di Desa Bontoraja membatasi akses pendidikan anak perempuan.	26,7%	40%	13,3%	20%	0%
5. Adat dan tradisi di Desa Bontoraja mempengaruhi pendidikan anak perempuan.	26,7%	40%	13,3%	6,7%	13,3%

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba, terdapat perbedaan signifikan dalam peran gender dalam konteks keluarga. Data menunjukkan variasi pandangan masyarakat terkait pendidikan anak perempuan. Sebanyak 33,3% responden mendukung pendidikan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara jumlah yang sama menunjukkan ketidaksetujuan terhadap hal tersebut. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas sikap orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak perempuan di Desa Bontoraja.

Pentingnya peran gender dalam memberikan kesempatan pendidikan juga terlihat dari fakta bahwa 33,3% responden sangat setuju bahwa peran anak perempuan dalam keluarga memengaruhi kesempatan pendidikan mereka. Meskipun mayoritas setuju atau merasa netral, 26,7% yang tidak setuju menyoroti kesadaran akan pengaruh gender dalam membentuk peluang pendidikan. Survei juga mengungkapkan ketidakpastian mengenai penilaian remaja dalam masyarakat, dengan 26,7% responden yang percaya bahwa remaja dinilai secara adil tanpa memandang gender. Adanya persentase yang tidak setuju atau sangat tidak setuju menyoroti potensi ketidaksetaraan dalam penilaian terhadap remaja. Padahal semua perempuan memiliki akses untuk meningkatkan pendidikannya. tidak hanya laki-laki, keduanya perlu mendapatkan kedudukan yang setara (Werdiningsih, 2020).

Terlihat bahwa norma budaya local membatasi akses pendidikan anak Perempuan. Budaya ini tetap berakar kuat dalam sebagian masyarakat Indonesia, di mana keyakinan akan dominasi laki-laki atas segala hal masih tersebar luas. Akibatnya, kaum perempuan seringkali mengalami perlakuan yang tidak adil dalam berbagai bentuk di masyarakat (Apriliandra &

Krisnani, 2021). terdapat 40% responden yang setuju bahwa norma-norma budaya lokal di Desa Bontoraja membatasi akses pendidikan anak perempuan. Ini mencerminkan adanya tantangan dalam menghadapi norma budaya yang mempengaruhi kesetaraan gender di lingkungan tersebut. Dalam konteks adat dan tradisi, Sebagian besar responden (40%) setuju bahwa adat dan tradisi di Desa Bontoraja mempengaruhi pendidikan anak perempuan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh faktor geografis tempat tinggal (Anas, et al, 2015; Hakim, 2016; Vito & Krisnani, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk akses pendidikan bagi anak Perempuan. Hasil survei ini menyoroti kompleksitas dinamika gender dalam keluarga di Desa Bontoraja, terdapat perbedaan peran gender yang signifikan dalam konteks keluarga. Data menunjukkan adanya variasi pandangan masyarakat mengenai pendidikan anak Perempuan, dan bahwa norma budaya dan adat istiadat setempat memainkan peran penting dalam membentuk akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan.

Didukung dengan hasil penelitian (Atta, 2015) Menjelaskan bahwa ketika masyarakat mengubah perspektif negatif terhadap akses pendidikan bagi perempuan maka berkemungkinan munculnya revolusi pendidikan yang setara antara pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, sikap diskriminasi untuk perempuan dapat diminimalisir dengan baik sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat dengan baik dan kesempatan perempuan dalam menempuh jenjang pendidikan dapat berjalan secara maksimal.

## **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat ketidaksetaraan dalam akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, norma budaya lokal, dan adat istiadat memainkan peran penting dalam menciptakan disparitas ini. Meskipun undang-undang menjamin hak akses pendidikan untuk semua warga, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan untuk mendapatkan pendidikan setara dengan laki-laki. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Bontoraja menciptakan pandangan bahwa laki-laki lebih diutamakan dalam hal pendidikan. Hal ini tercermin dalam perbedaan persepsi mengenai akses pendidikan antara kedua gender. Fasilitas pendidikan, materi pelajaran, dan perlakuan guru terhadap siswa cenderung tidak merata antara perempuan dan laki-laki.

Tidak hanya itu, norma budaya lokal dan adat istiadat di Desa Bontoraja juga membatasi akses pendidikan perempuan. Pandangan bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik dan tidak perlu mengejar pendidikan tinggi masih mempengaruhi keputusan orang tua dalam mendukung pendidikan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan, diperlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pentingnya meningkatkan kesadaran dan mengubah pola pikir masyarakat terkait hak pendidikan perempuan perlu ditekankan. Selain itu, perlu adanya kebijakan dan program yang mendukung pemerataan akses pendidikan serta memberikan insentif bagi keluarga untuk mendukung pendidikan anak perempuan.

Dengan demikian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan di Desa Bontoraja dan wilayah sekitarnya. Pendidikan yang setara bagi semua warga, tanpa memandang gender, merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan berkembang.

## **Referensi**

- Adriani, E. (2019). Pengukuran modal manusia (suatu studi literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 176-183. <http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Afrizal, S., & Lelah, P. (2021). Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga: Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 53-62. <https://doi.org/10.52483/ijased.v3i1.53>
- Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa dan kota dalam potret pendidikan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592>
- Aprilia, V., Silalahi, R. B., Halizah, N., & Ivanna, J. (2023). Perspektif Masyarakat Tentang Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Di Kota Medan. *Inovasi: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, 1(3), 34-43. <https://ejournal.lipib.com/index.php/inovasi/article/view/76>
- Apriliandra, S. dan Krisnani, H. (2021) "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik,". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), hal. 1. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.
- Ari, I. A. D. K. (2021). A Stereotip Perempuan dan Kekerasan Simbolik pada Narasi Pemberitaan Media Online. *Gestalt: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 3(1), 29-42. <https://doi.org/10.33005/gestalt.v3i1.72>
- Atta, G. P. (2015). Education Inequality: How Patriarchy and Policy Collide in Ghana. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(71), 11-19. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/0f4a/4b2f93507330ba034c5fb0bd1adaf8eegfda.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Manusia. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1557/pada-tahun-2018--indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-mencapai-71-39.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin. Retrieved from <https://sulsel.bps.go.id/indicator/40/1676/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html>
- Fatimah, JM (2014). Komunikasi Keluarga Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Kesetaraan Anak Perempuan dalam lingkaran Kemiskinan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30 (2), 199-208. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i2.753>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575>
- Hazairin, A. Z., Kandi, N. S., & Hadi, M. A. L. (2023, November). Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Kesetaraan Gender. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 2, pp. 1194-1204)*. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/896/349>
- Luhulima, A. S. (2014). CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. dari <https://books.google.co.id/books?id=yiUaDAAQBAJ&pg=PR6&ots=3lrCne3Kb2>

[&dq=Conventionwatch%2C%202007&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Conventionwatch,%202007&f=false](#)

- Moechtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. dari <https://books.google.co.id/books?id=xfCNDwAAQBAJ&pg=PP1&dq=hukum%20waris&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=hukum%20waris&f=false>
- Mukhtar, M. (2019). Harakah dan Kemandirian Perempuan. *Al-Maiyyah Media Transform. Gend. dalam Paradig. Sos. Keagamaan*, 12(1), 71-90. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.684>
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasir, N., & Lilianti, L. (2017). Persamaan hak: partisipasi wanita dalam pendidikan. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 17(1). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v17i1.1554>
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Saeful, A. (2019). Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 17-30. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Tarbawi/article/view/88>
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>
- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5(1). <https://www.ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/view/100>